BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kerja Praktek

Perguruan tinggi yang berperan sebagai lembaga pendidikan formal diharuskan menghasilkan sumber daya manusia yang handal, serta mampu bersaing dan berperan dalam dunia kerja yang dihadapi di kemudian hari, sebagai mahasiswa diwajibkan mampu mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama belajar di perguruan tinggi. Kerja praktek adalah salah satu sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya selama mengikuti perkuliahan dan mengaplikasikannya di dunia kerja yang akan dihadapi setelah lepas dari perkuliahan.

Kerja praktek adalah salah satu kurikulum perkuliahan yang ada di Program studi Manajemen Universitas Komputer Indonesia. Kerja praktek merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan masa perkuliahan.

Mata kuliah kerja praktek ini bersifat praktis, artinya mahasiswa langsung terjun ke lingkungan kerja dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang ilmu ekonomi. Salah satunya yaitu dalam dunia perbankan.

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peranan perbankan dalam

suatu negara sangat penting. Tidak ada satu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak *defisit* dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilitas dana dari pihak *surplus* dana ke pihak *defisit* dana.

Saat ini ada dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah : modal *ventura*, anjak piutang, dana pensiun, dan pegadaian. Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun kegiatan konsumtif.

Berbicara tentang bank, bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Disisi lain bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan menyalurkan dana ini dikenal juga dengan istilah

alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 *"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam yang melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".*

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerimaan kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Dalam rangka mendorong laju pembangunan dan pengentasan kemiskinan, Bank bjb kcp Pemkot Bandung senantiasa memprioritaskan pemberian kredit kepada masyarakat dan para pengusaha kecil/mikro. Salah satu kredit yang diberikan adalah Kredit Guna Bhakti (KGB). Kredit Guna Bhakti adalah fasilitas kredit yang diberikan dengan persyaratan ringan kepada para pegawai yang memiliki penghasilan tetap khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kredit Guna Bhakti (KGB) dirancang untuk membantu masyarakat kecil yang berpenghasilan tetap (PNS) dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Fasilitas kredit guna bhakti adalah fasilitas untuk pegawai yang berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui Bank bjb yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti perbaikan rumah, pembelian kendaraan, pembelian tanah, memperluas usaha, dan lain sebagainya dengan sumber pembayaran utama berasal dari penghasilan yang bersangkutan.

Dalam melakukan proses awal hingga akhir mengenai kegiatan pemberian kredit kepada debitur, terkadang ada hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaanya, salah satunya yang penulis rasakan yaitu mengenai penyerahan berkas agunan. Bagi debitur yang telah melunasi kreditnya dan tidak mengulang atau meminjam kredit lagi maka dokumem-dokumen yang diberikan debitur kepada pihak bank diserahkan kembali kepada debitur yang bersangkutan.

Penulis telah melakukan kerja praktek dengan memilih Bank bjb kcp Pemkot Bandung, sebagai lokasi kerja praktek yang beralamat di Jl. Wastukencana No.21 Bandung . Penulis memilih Bank bjb karena keingintahuan penulis tentang bagaimana prosedur pemberian kredit pada Bank bjb kcp Pemkot Bandung yang salah satunya yaitu Kredit Guna Bhakti.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang tinjauan prosedur pemberian kredit pada Bank bjb dengan mengambil judul: **“Tinjauan Prosedur Pemberian Kredit Guna Bhakti (KGB) Pada Bank bjb kcp Pemkot Bandung”**.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah untuk memperoleh deskripsi mengenai prosedur pelaksanaan Kredit Guna Bhakti. Sehingga penulis dapat menguji kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya pada saat perkuliahan dan dapat mengaplikasikannya ke dalam kegiatan yang nyata yaitu di dunia perbankan.

Sedangkan tujuan penulis melaksanakan kerja prakek ini adalah:

a. Untuk mengetahui prosedur pemberian Kredit Guna Bhakti pada Bank bjb kcp Pemkot Bandung.
b. Untuk menganalisa berbagai kegiatan yang terjadi dalam proses pemberian kredit di Bank bjb kcp Pemkot Bandung.
c. Untuk mengimplementasikan antara teori yang di pelajari di kampus dengan praktek dilapangan.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan dari laporan PKL ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

   Bagi penulis hasil kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang didapat dari bangku kuliah sehingga dapat membandingkan dengan kenyataan yang ada dilapangan dengan berbagai masalah yang relevan.

b. Bagi Perusahaan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi yang memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sehingga dapat

mendukung dan menguatkan teori yang telah ada dan memperluas wawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkreditan.

c. Bagi pihak lain

Laporan ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya maupun sebagai informasi lainnya.

1.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1. Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Di Bank bjb kcp Pemkot Bandung, yang beralamat di Jl. Wastukencana No.21 Bandung

1.4.2. Waktu Praktek Kerja Lapangan

Waktu pelaksanaan praktek kerja lapangan dilaksanakan mulai tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 29 Juli 2011, dengan waktu kerja dari pukul 07.30 sampai dengan 16.00 WIB. Waktu yang ditempuh dalam melaksanakan kerja praktek ini selama 1 bulan. Adapun aktivitas kantor adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Aktivitas Kantor dan Kerja Praktek

No.	Keterangan	Bulan																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey tempat PKL																				
2	Kerja praktek																				
3	Wawancara																				
4	Penyusunan																				
5	Bimbingan kerja praktek																				
6	Penyerahan laporan																				